

## PERAN BPJS KESEHATAN PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI IBU HAMIL DI GOA BOMA

### THE ROLE OF HEALTH BPJS IN IMPROVING THE ECONOMIC WELFARE OF PREGNANT WOMEN IN GOA BOMA

Deffrinica <sup>1)</sup>, Benediktha Kikky Vuspitasari <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Institut Shanti Bhuana, Bengkayang Kalimantan Barat  
\*e-mail: deffrinica10@gmail.com

Submit 25 Agustus 2020, Revisi 2 Desember 2020, Terbit 31 Desember 2020

#### ABSTRACT

*The purpose of this study was to investigate the level of welfare of pregnant women before and after obtaining BPJS for Health Services. The research was a qualitative descriptive approach. It applied a focus group discussion (FGD) and structured interviews with a questionnaire. The samples were 24 pregnant women from the village of Goa Boma. The results showed that most pregnant women got the benefits of health services for giving birth and its recovering. Having this BPJS Health service, they could save the costs the medical examination and childbirth. These unpaid costs could be allocated for other household needs and / or to meet the needs of the baby who was just born. Even though they were treated in the second and third class, they calimed that the services were acceptable. class of health services they get is second and third class.*

**Keywords:** Health insurance, economic welfare, pregnant women, FGD

#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tingkat kesejahteraan ibu hamil sebelum dan sesudah memperoleh BPJS kesehatan. Penelitian disajikan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara terstruktur dengan angket (kuisioner). Sampel penelitian ini adalah ibu hamil desa Goa Boma yang berjumlah 24 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu hamil merasakan manfaat dari layanan kesehatan ketika akan melahirkan bahkan ketika pemulihan. Dengan memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan ini, mereka dapat melakukan penghematan biaya pemeriksaan kesehatan dan persalinan. Pendapatan mereka dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya dan atau untuk memenuhi kebutuhan anak yang sudah dilahirkan. Meskipun kelas layanan kesehatan yang mereka dapatkan adalah kelas dua dan tiga, tetapi pelayanan yang mereka dapatkan dinilai 'cukup'.

**Kata Kunci:** BPJS Kesehatan, Tingkat Kesejahteraan Ekonomi, Ibu Hamil, FDG.

## PENDAHULUAN

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Sistem ini diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004. Undang-Undang ini mengamatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk di Indonesia, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Institusi pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dapat memberikan layanan program ini tersebut berdasarkan kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kementerian Kesehatan saat ini sedang mengupayakan suatu regulasi turunannya berupa peraturan menteri, yang akan menjadi payung hukum untuk mengatur antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan tingkat pertama, dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan meluncurkan kebijakan Jaminan Persalinan (Kemenkes RI, 2011). Angka kematian ibu sudah mengalami penurunan. Namun, angka penurunannya masih jauh dari target MDG's tahun 2015, meskipun jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mengalami peningkatan. Derajat kesehatan masyarakat dinilai berdasarkan beberapa indikator yang mencerminkan kondisi mortalitas (kematian), status gizi dan morbiditas (kesakitan). Selain dipengaruhi oleh faktor kesehatan seperti pelayanan

kesehatan dan ketersediaan sumber daya kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial (Dinkes Propinsi Riau, 2014).

Program BPJS Kesehatan adalah Program jaminan sosial yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan secara nasional melalui gotong-royong wajib oleh seluruh penduduk Indonesia dengan iuran berkala yang dibayar oleh masing-masing individu atau dibayar oleh Pemerintah kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan nirlaba. Program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pada 2017 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat berkomitmen dan memutuskan untuk memberikan dan membiayai jaminan kesehatan kepada penduduk kurang mampu, yang berjumlah kurang lebih 40% dari total 257 juta penduduk Indonesia.

Pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik dan melakukan sosialisasi ke desa-desa hingga desa Goa Boma agar masyarakat ibu hamil khususnya dapat memiliki BPJS Kesehatan. Rolos (2014) mengatakan bahwa sosialisasi kepada masyarakat telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan. Merujuk kepada hasil observasi penelitian dengan cara wawancara terhadap 24 orang pasien yang terdaftar dalam kelompok ibu hamil di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Desa Goa Boma kecamatan Monterado, terdapat

sekitar 14 orang yang belum menjadi peserta BPJS dan belum mengetahui dengan jelas tentang manfaat BPJS kesehatan. Mereka umumnya berasal dari kelompok masyarakat ekonomi cukup rendah. Mereka bekerja sebagai petani dan penambang emas. Responden yang telah memiliki BPJS kesehatan berjumlah 10 orang ibu hamil. Mereka semua memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas.

Di kalangan masyarakat masyarakat muncul persepsi yang masih kurang baik terhadap program JKN. Penyebabnya adalah pengetahuan mereka tentang program BPJS kesehatan yang masih rendah. Imelda (2018) menyarankan bahwa petugas BPJS/tenaga Kesehatan masih perlu meningkatkan pelaksanaan sosialisasi tentang hubungan antara pendidikan, status ekonomi, pengetahuan dan BPJS kesehatan baik di kota maupun di pedesaan.

Jalan dari Desa Goa Boma, di kecamatan Monterado ke kota kurang baik. Sarana pemerintah desa ini juga masih minim. Faktor ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki BPJS kesehatan khususnya ibu hamil.

Karena masyarakat memberi kontribusi dengan menyetor iuran setiap bulan, pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana agar manfaat program JKN dapat dirasakan oleh masyarakat secara maksimal. Dengan demikian, masyarakat mengharapkan agar pemerintah menyediakan fasilitas dan kemudahan kepada masyarakat khususnya ibu hamil untuk memperoleh jaminan Kesehatan. Trisna & Hasanuddin (2017) menjelaskan bahwa

sistem BPJS berfungsi sebagai pemecah kesulitan ekonomi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.

Mekanisme BPJS memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya ibu hamil untuk mengakses fasilitas kesehatan. Mereka diharapkan dapat memiliki layanan kesehatan ketika persalinan. Hal ini dapat menekan jumlah angka kematian ibu ketika melahirkan. Gustia et al. (2017) mengatakan bahwa angka kematian ibu melahirkan bukan hanya karena pembiayaan persalinan, tetapi juga karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan upaya kesehatan. Disamping kerjasama yang baik antara petugas kesehatan, kader, keluarga dan masyarakat, jumlah kepesertaan JKN semakin meningkat.

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti manfaat BPJS kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya ibu hamil. Penelitian ini dilakukan karena melihat masih banyak masyarakat khususnya ibu hamil yang belum memiliki BPJS kesehatan. Hal ini juga dipengaruhi oleh sebagian masyarakat yang masih belum memiliki KTP, dan kartu keluarga (Rismawan et al., 2018)

Belum optimalnya pemutakhiran data BDT yang dilakukan di tingkat kelurahan adalah faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam menentukan ketepatan sasaran dari implementasi kebijakan tersebut. Masyarakat yang sudah memiliki BPJS sangat terbantu dengan adanya program BPJS tersebut. Akan tetapi, masyarakat yang belum memiliki BPJS kesehatan mengalami kendala karena mahalnya fasilitas kesehatan. Pembiayaan

kesehatan yang besar ini membuat masyarakat setempat kurang memperhatikan kesehatan mereka terutama pada kaum perempuan.

Oleh sebab itu, harapan dari masyarakat adalah dilakukannya perbaikan sistem pelayanan kesehatan yang sudah ada, serta mekanisme pelayanan BPJS dipermudah agar sistemnya tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat khusus ibu hamil di Desa Goa Boma. Menurut Windy Rolos, Ardiansa Tucunan (2014) manfaat yang diperoleh peserta BPJS kesehatan bersifat medis dan non medis. Manfaat yang bersifat non-medis antara lain iuran bagi peserta BPJS kesehatan; bagi yang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah, sedangkan bagi yang mampu, BPJS kesehatan mandiri dibayarkan secara pribadi.

Basuki et al. (2016) mengatakan bahwa BPJS Kesehatan sebagai pelaksana kebijakan sudah berupaya maksimal memberikan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan. Namun, untuk mewujudkan keseluruhan warga negara terjamin dalam jaminan kesehatan nasional memang memerlukan proses dan waktu. Begitu pula dengan desa Goa Boma, memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang BPJS kesehatan telah dilakukan oleh petugas. Namun demikian, masyarakat khususnya ibu hamil tetap membutuhkan proses untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan BPJS kesehatan.

## **METODE**

Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok ibu hamil di Desa Goa

Boma, Kecamatan Monterado, yang terdaftar di Posyandu Desa Goa Boma. Sampelnya berjumlah 24 orang ibu hamil dengan rincian 14 orang belum memiliki BPJS dan 10 orang sudah memiliki BPJS. Kemudian, pengambilan sampel didistribusikan ke desa Goa Boma khusus bagi kelompok posyandu ibu hamil yang terdaftar pada data pada Posyandu desa di Goa Boma dan dengan menggunakan teknik proportional sampling.

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan. Tahapan pertama (TP) adalah studi literatur untuk memperoleh konsep proses peran jaminan kesehatan khususnya BPJS terhadap tingkat kesejahteraan kelompok ibu hamil. Tahap kedua (TD) adalah tahap fenomenologi, yang merupakan suatu penelitian empiris untuk memahami suatu fenomena melalui proses pengumpulan data yang kemudian diinduksikan secara alami (Morse, 2001). Dalam tahapan ketiga (TT), penelitian menggunakan pendekatan FGD (Focus Group Discussion) untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah yang sangat spesifik.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi yang direkam. Hasil dari observasi kegiatan atau aktivitas kelompok ibu hamil ditulis dalam catatan deskriptif dan didokumentasikan. Observasi dilakukan selama 7 bulan dengan memantau seluruh kegiatan ibu hamil di Desa Goa Boma yang tergabung dalam kelompok ibu hamil pada saat melakukan posyandu kehamilan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dalam masyarakat sudah banyak dilakukan. Hal ini didasari untuk mengentaskan kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu program yang diselenggarakan Pemerintah adalah pengadaan BPJS kesehatan bagi masyarakat kurang mampu guna memperbaiki tingkat kesehatan dan bantuan bagi masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan penduduk desa Goa Boma yang belum memiliki kartu BPJS lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang telah memilikinya. Tingginya angka ketiadaan kepemilikan kartu BPJS ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa fasilitas kesehatan ini cenderung mahal. Ini berdampak kepada kurangnya masyarakat setempat dalam memperhatikan kesehatan mereka terutama pada kaum perempuan. Oleh sebab itu, masyarakat berharap adanya perbaikan sistem pelayanan kesehatan yang ada dan mempermudah mekanisme pelayanan BPJS.

Dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan, sebaiknya masyarakat diberikan kemudahan dalam prosedur pendaftaran sebesar 61,8%. Kemudahan ini mulai dari persyaratan, lokasi atau tempat pendaftaran di kantor BPJS yang mudah dijangkau dan mendapatkan kartu anggota BPJS dengan segera sejalan. Menurut Putro & Barida (2017), sebaiknya ada kemudahan bagi ibu hamil yang ingin mendaftarkan diri pada

program jaminan Kesehatan sehingga para ibu hamil dapat menerima manfaat dari program BPJS Kesehatan.

Menurut responden, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi intensif di berbagai acara. Untuk lebih memperkenalkan arti penting program JKN ini. Peran aktif dari tenaga kesehatan seperti Bidan Desa juga diperlukan untuk turut mensosialisasikan manfaat dari keikutsertaan JKN kepada ibu-ibu hamil di Posyandu. Dengan mengetahui arti penting keikutsertaan di JKN dan manfaat yang akan diterima, diharapkan kepesertaan ibu-ibu hamil dalam program ini dapat meningkat. Pihak BPJS Kesehatan juga perlu mensosialisasikan tentang kemudahan-kemudahan pengurusan administrasi pada program JKN ini. Pihak BPJS dapat datang ke desa pedalaman ini untuk memfasilitasi pendaftaran secara kolektif selain mensosialisasikan kepada masyarakat untuk lebih memahami tentang program JKN ini. Sejalan dengan penelitian Rukmini (2018), BPJS telah menerbitkan peraturan untuk mendukung peningkatan kepesertaan JKN sebagai PBI Daerah dan melakukan berbagai proses mulai dari advokasi sampai perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Masyarakat perlu memahami aturan atau sistem yang sudah diterapkan agar mereka dapat mendaftarkan diri pada BPJS kesehatan.

Tabel 1. Hasil FGD Bersama Ibu Hamil

No	Nama	Jumlah Anak	Layanan Kesehatan	Keterangan
1	Ibu S	2	BPJS Kesehatan Pemerintah	Sangat membantu
2	Ibu N	2	BPJS Kesehatan Pemerintah	Sangat membantu
3	Ibu S	4	BPJS Kesehatan Pemerintah	Sangat membantu
4	Ibu Y	1	BPJS Kesehatan Pemerintah	Sangat membantu
5	Ibu B	2	BPJS Kesehatan Pemerintah	Sangat membantu
6	Ibu E	1	BPJS Kesehatan Pemerintah	Sangat membantu
7	Ibu L	1	BPJS Kesehatan Pemerintah	Sangat membantu
8	Ibu S	2	BPJS Kesehatan Pemerintah	Sangat membantu
9	Ibu H	2	BPJS Kesehatan Pemerintah	Sangat membantu
10	Ibu S	1	BPJS Kesehatan Pemerintah	Sangat membantu
11	Ibu A	2	BPJS Kesehatan Pemerintah	Sangat membantu
12	Ibu Y	1	Tidak Ada	Berharap BPJS bebas biaya dan mudah dalam urusan pembuatan BPJS Kesehatan
13	Ibu I	2	Tidak Ada	Tidak memiliki KK/KTP
14	Ibu N	2	Tidak Ada	Tidak memiliki KK/KTP
15	Ibu A	1	Tidak Ada	Tidak memiliki KK/KTP
16	Ibu J	1	Tidak Ada	Tidak memiliki KK/KTP
17	Ibu I	1	Tidak Ada	Tidak memiliki KK/KTP
18	Ibu Y	2	Tidak Ada	Tidak memiliki KK/KTP
19	Ibu J	2	Tidak Ada	Tidak memiliki KK/KTP
20	Ibu M	2	Tidak Ada	Tidak memiliki KK/KTP
21	Ibu F	1	Tidak Ada	Sangat membantu segala permasalahan Kesehatan
22	Ibu M	2	Tidak Ada	Tidak Memiliki KK (KK Campur)
23	Ibu R	1	BPJS Kesehatan Pemerintah	Sangat membantu sekali
24	Ibu D	2	BPJS Kesehatan Pemerintah	Sangat membantu sekali

Sumber: data FGD bersama ibu hamil tahun 2019

Seperti terlihat pada Tabel 1 diatas, hanya sebagian dari 24 orang ibu rumah tangga/hamil yang memiliki layanan kesehatan berupa BPJS Kesehatan. Penyebabnya adalah masih kurangnya kelengkapan administrasi yang dimiliki seperti KK dan KTP ini. Sebagian masyarakat di Desa Goa Boma menikah secara adat dan mereka belum mengurus administrasi setelah menikah. Dengan demikian,

kelengkapan persyaratan administrasi untuk pengusulan program JKN ini menjadi kendala.

Responden menyebutkan untuk layanan kesehatan BPJS sebenarnya sudah sangat baik dan sangat membantu khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Hanya saja, mekanismenya masih dirasa memberatkan masyarakat untuk mendaftarkan diri pada layanan kesehatan. Hasil penelitian ini tidak

sejalan dengan temuan penelitian yang dilaporkan oleh Trisna & Hasanuddin (2017), yang menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh secara internal adalah (1) faktor mekanisme pencairan klaim BPJS, (2) faktor keuangan rumah sakit, (3) faktor sarana prasarana, dan (4) faktor sumber daya manusia. Adapun faktor yang berpengaruh secara eksternal adalah (1) masyarakat kurang menyadari bagaimana cara mengurus kartu BPJS disertai dengan persepsi bahwa pengurusan kartu BPJS menyusahkan, (2) komunikasi antar lembaga, (3) lingkungan dimana pemerintah daerah juga menganggap program ini merupakan program yang penting dan harus terselenggara baik sehingga memberikan dukungan penuh, dan (4) regulasi dimana penyelenggaraan program JKN sudah didukung peraturan yang berlaku dan sudah berjalan dengan baik. Pemerintah sudah memberikan sistem pelayanan maupun pendaftaran layanan BPJS Kesehatan dengan mudah, tetapi masyarakat belum menyadari bagaimana cara mengurus pendaftaran layanan BPJS Kesehatan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar ibu hamil merasakan manfaat dari layanan kesehatan yang dapat mereka gunakan ketika akan melahirkan bahkan ketika pemulihan. Dengan memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan ini, mereka dapat melakukan penghematan biaya pemeriksaan kesehatan dan persalinan. Pendapatan mereka dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya dan atau untuk memenuhi kebutuhan anak yang baru dilahirkan. Meskipun kelas layanan kesehatan yang mereka

dapatkan kelas dua dan tiga, tetapi pelayanan yang mereka dapatkan cukup bermanfaat. Hal ini juga dikemukakan oleh Tampi et al. (2016) yang menyatakan bahwa faktor penghambat dari kurangnya jumlah ibu hamil di Desa Goa Boma dalam kepesertaan program JKN ini disebabkan karena aksesibilitas (jalan) yang masih sangat buruk. Selain itu, lokasi desa ini cenderung jauh dari sarana prasarana pemerintah dan kantor layanan BPJS Kesehatan.

Dilihat dari aspek pelayanan, masyarakat peserta jaminan kesehatan masyarakat banyak sekali diperhadapkan dengan pelayanan yang berstratifikasi. Peserta BPJS golongan dua, yang melakukan pengobatan baik rawat jalan maupun rawat inap sering diterlantarkan. Kenyataan ini terlihat jelas baik di pusat kesehatan masyarakat maupun rumah sakit.

Tabel 2. Data Pendapatan dan Kepemilikan Kendaraan

No	Nama	Tahun 2013		Tahun 2018	
		Pendapatan	Kendaraan	Pendapatan	Kendaraan
1	Ibu S	1.500.000	Tidak ada	2.000.000	Ada
2	Ibu N	1.700.000	Tidak ada	2.500.000	Ada
3	Ibu S	1.500.000	Tidak ada	2.500.000	Ada
4	Ibu Y	2.000.000	Ada	3.000.000	Ada
5	Ibu B	1.500.000	Tidak ada	2.000.000	Ada
6	Ibu E	1.500.000	Tidak ada	2.500.000	Ada
7	Ibu L	3.000.000	Ada	3.500.000	Ada
8	Ibu S	2.500.000	Ada	2.500.000	Ada
9	Ibu H	1.000.000	Tidak ada	1.800.000	Ada
10	Ibu S	2.000.000	Ada	2.500.000	Ada

Sumber: Data FGD Bersama Ibu Hamil Tahun 2019

Kepesertaan dalam program BPJS Kesehatan juga secara tidak langsung dapat membantu menghemat pengeluaran rumah tangga, terutama dalam pembiayaan kesehatan. Hal ini dikarenakan ibu-ibu hamil dapat menyimpan uang yang seharusnya dikeluarkan untuk pemeriksaan kehamilan, berobat maupun melahirkan. Ibu-ibu hamil yang memiliki kartu kepesertaan pada program JKN ini tidak dikenakan biaya untuk hal-hal tersebut. Kehadiran program ini tentunya sangat

membantu ekonomi keluarga khususnya ibu hamil. Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pendapatan dan kendaraan yang mereka miliki sebelum dan sesudah memiliki BPJS kesehatan meningkat. Pendapatan ekonomi keluarga dan kendaraan yang sebelumnya tidak mereka miliki, dan pada tahun 2018 rata-rata mereka memiliki kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya BPJS kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya ibu hamil di desa Goa Boma

Tabel 3. Jumlah Ibu Hamil yang Memiliki Tabungan Dan Tidak Tahun 2013-2018

Tahun	Ada BPJS Kesehatan	Tidak ada BPJS Kesehatan	Ada Tabungan	Tidak Ada
2013	2	14	1	15
2014	4	13	3	14
2015	4	9	4	9
2016	5	8	5	8
2017	10	14	9	15
2018	10	14	10	14

Sumber: Data FGD Bersama Ibu Hamil 2019

Dari data pada Tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan ekonomi pada ibu hamil yang memiliki BPJS Kesehatan. Buktinya

dapat dilihat dari adanya peningkatan pemilikan tabungan pada bank, yang dapat dijamin sebagai jaminan ekonomi yang disimpan oleh ibu hamil-



pada saat mereka melakukan periksa dan melahirkan.

Manfaat yang didapatkan oleh ibu hamil sebagai peserta BPJS kesehatan adalah mereka memperoleh pelayanan pemeriksaan ibu hamil secara gratis, persalinan gratis dan periksa kesehatan keluarga ibu hamil gratis serta ambulan ketika adanya kegawatan terhadap kehamilannya. Dengan manfaat tersebut diatas uang atau pendapatan yang dialokasikan untuk dana kesehatan dapat ditabung untuk keperluan keluarga dan belanja kebutuhan bayi dan ibu pada saat melahirkan.

Dilihat dari aspek ekonomi, keluarga ibu hamil peserta BPJS kesehatan sangat terbantu, berbeda dengan ibu hamil yang bukan peserta BPJS kesehatan, mereka dapat gagal bayar pembayaran yang menyulitkan ibu hamil dan keluarganya. Mereka juga masih harus menanggung biaya untuk pemeriksaan setiap bulan, persalinan dan kelengkapan bayi. Disamping itu, saat melahirkan menanggung biaya ambulan karena lokasi desa Goa Boma berada di pedalaman dan sangat jauh dari rumah sakit.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa peran BPJS kesehatan bagi ibu hamil sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hal ini didasarkan kepada pendapatan yang dipergunakan untuk kebutuhan kesehatan dapat disimpan atau ditabung untuk keperluan rumah tangga lainnya

## **REKOMENDASI**

Pemerintah Kabupaten Bengkayang disarankan untuk lebih memperhatikan masyarakat yang berada jauh dari pusat kota agar dapat menerima manfaat bantuan pemerintah

khususnya ibu hamil sehingga dalam proses kelahiran atau pada masa kehamilan mereka dapat memiliki BPJS dan dapat digunakan dan sebagai bentuk pemberdayaan. Kemudian, diharapkan para petugas layanan Kesehatan BPJS selalu rutin dengan kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan yang dapat memberi pengetahuan pentingnya memiliki jaminan Kesehatan berupa BPJS Kesehatan dan proses pendaftaran untuk mengajukan jaminan Kesehatan berupa BPJS kesehatan dan sehingga keluarga dari ibu hamil dapat meningkatkan perekonomian keluarga mereka dengan pendapatan yang dapat ditabung.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Bidan Desa Goa Boma yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini hingga selesai.

Terima kasih disampaikan kepada segenap kelompok ibu hamil yang tergabung dalam ibu posyadu 2019 di Desa Goa Boma yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini hingga selesai.

Terima kasih kepada Institut Shanti Bhuana yang telah membantu dalam proses penelitian ini hingga selesai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Basuki, E. W., Sulistyowati, D., Si, M., Retno, N., Sos, S., & Si, M. (2016). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang. 1–11.
- Dinkes Propinsi Riau. (2014). Profil Kesehatan Provinsi Riau 2013. Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 53(9), 1689–1699.

- Gustia, H., Susilahati, S., & Susilo, D. (2017). Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Angka Kematian Ibu di Kota Bogor (Studi Fenomena dan Dampak Kesehatan). *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.24853/jkk.13.1.55-60>
- Imelda, S. (2018). Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Ibu Bersalin Dalam Pemanfaatan Bpjs Di Puskesmas Tenayan Raya. *Jurnal Endurance*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.22216/jen.v3i1.1831>
- Morse, J. M. (2001). Are There Risks in Qualitative Research? *Qualitative Health Research*, 11(1), 3–4. <https://doi.org/10.1177/104973201129118867>
- Putro, G., & Barida, I. (2017). Manajemen Peningkatan Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional pada Kelompok Nelayan Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 27(1), 17–24. <https://doi.org/10.22435/mpk.v27i1.5755.17-24>
- Rismawan, R., Diah, A. P., & Padmawati, R. S. (2018). Implementasi Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu Di Era Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 07(04), 178–189. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkki/article/view/40547>
- Tampi, A. G. C., Kawung, E. J. R., & Tumiwa, J. W. (2016). Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu. *Acta Diurna*, 5(1), 40–52. <file:///E:/11717-23371-1-SM.pdf>
- Trisna, & Hasanuddin, K. X. I. V. (2017). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat ( Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna , Kabupaten Bengkulu